

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

*Dafit Bringan¹
Agustinus Pati²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui masalah penelitian, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kreatif lokal dan modal social yang suda dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbukan kembali semangat gotong royong, sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa dan melakukan pembagunan desa dan pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kapala desa lebih bersifat pada pengelolah keuangan desa dengan sefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dengan mengelolah potensi yang di miliki oleh desa mamuya selain mengembangkan potensi tambag pasir, tambag batu dan pertanian, dalam mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014 disebutkan adanya otonomi desa, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing desa. Peningkatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dipercepat melalui peningkatan pelayanan di desa dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi desa dan keanekaragaman yang dimiliki oleh desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah desa. Terkait dengan hal tersebut, Desa memiliki peran kepala desa yang penting dalam menunjukkan keberhasilan pemerintah desa karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya untuk memperoleh pelimpahan sebagai wewenang camat untuk menangani urusan otonomi desa jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang di limpahkan semakin besar tanggung jawab kepala desa dalam mengemban tugas.

Pemerintah desa yang di lakukan pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan sumber daya manusia yang di lakukan secara berkelanjutan. Dimana pemerintah yang di esensikan adanya perubahan di harapkan berlangsung dalam berbagai dimensi kehidupan dalam berbagai lapisan, kehidupan masyarakat yang

berada dalam suatu wilayah penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat ini kita melihatnya bahwa penyelenggaraan itu terjadi dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perubahan yang di isyaratkan oleh pemerintah adalah perubahan yang berlangsung secara nasional. Perubahan yang di kehendaki oleh seluruh masyarakat adalah peningkatan masyarakat, dengan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kemudahan dalam mengakses informasi, masyarakat dalam proses dan upaya pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa sebagai mana menyelenggara kewajiban dalam merumuskan program-program yang tepat untuk upaya dengan memberikan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas masyarakat yang untuk upaya oleh pemerintah desa yang melibatkan oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pemerintah, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat di kembangkan sehingga mereka berperan bukan sebagai obyek melainkan subyek.

Pelaksanaan program dimulai dengan program pemberdayaan masyarakat, yaitu program pengembangan desa (PPD) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di desa. Dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan peran kepala desa yang di harapkan dapat di perlu hingga ke desa-desa terpencil dan Sebagai program pemberdayaan terbesar di Indonesia ini di mulai memusnakan kegiatannya di wilayah desa. Dalam seluruh anggota masyarakat di ajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif mulai dari proses perencanaan,

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengolahan dana sesuai kebutuhan prioritas di desa masing-masing hingga pelaksanaan.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat salah satu upaya untuk meningkatkan. Dengan tujuan untuk efektivitas lapangan kerja. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase (Pranaka dan Prijono, 1996) adalah bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah. Fase Partisipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan untuk menuju kemandirian. Fase Emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di kemukakan perumusan masalah yaitu bagaimana Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mamuya kecamatan galela kabupaten Halmahera utara? Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mamuya kecamatan galela keb, Halmahera utara.

Tinjauan Pustaka

Menurut Sondang P.Siagian (2003:54) menyatakan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk

diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan. Jaick C.Plano (1994:20), mengemukakan bahwa peranan atau "ROLE: yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social. Yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Menurut W.I.S.Poerwadarmint (1985:735). Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan tertentu atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa.

Menurut Thoba Mitha (1983: 309) peran sebagai suatu perilaku yang tertentu karena suatu jabatan tertentu.

Menurut Muhamat Ali (1986:304) menyatakan bahwa peran adalah suatu yang diperoleh dalam kegiatan atau yang memegang jabatan pimpinan yang terutama suatu hal atau peristiwa. Adapun menurut A.Marwato yang dikutip oleh Talizuduhu Ndraha (2003: 504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang di dalam kegiatan yang berhubungan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat-akibat kedudukan yang dimiliki di dalam struktur social dalam interaksinya dengan sesamanya seperti antar pemerintah kota dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Pada hakikatnya peran mempunyai arti aktifitas atau kegiatan dilakukan seseorang yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu struktur dan suatu posisi atau kedudukan dalam organisasi atau kelompok.

Jadi, dapat disimpulkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyusunan diri, dan sebagai suatu proses; jadi tempatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu status

(posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Peranan berasal dari peran, berarti suatu yang memujudkan bagian yang memegang pemimpin terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (W.J.S. Poerwadarminta, 1976). Peranan menurut Lenvison dikutip oleh Soejono Soekanto sebagai berikut: peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur social masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan nilai-nilai.

Adapun makna dari kata "peran" dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarag drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjukkan pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang actor dalam sebuah pentas drama.

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan social dengan batas-batas yang di rumuskan dengan jelas (Ralph Linton 1993: 91). Sedangkan Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah

orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto 1986 : 22). Setiap kumpulan orang yang disebut masyarakat mengandung unsur-unsur seperti.

- a. Adanya manusia yang hidup bersama
- b. Orang yang bergaul untuk waktu yang lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama,

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha pembangunan yang dewasa ini sedang. Pada mulanya pembangunan masyarakat telah dilaksanakan di dunia dengan macam-macam pendekatan dan teori. Pembangunan nasional pada bangsa-bangsa barat yang sudah maju dilandaskan pada teori-teori ekonomi yang menitikberatkan pada alokasi optimum sumber-sumber ekonomi, maka usaha pencapaian *Full Employment* dan mencegah stagnasi.

Pada Negara-negara yang sedang berkembang dan baru mulai tinggal landas, pertumbuhan di samping redistribusi pendapat yang lebih merata yang lebih diutamakan, sehubungan dengan tinggal landas itu maka strategi pembangunan yang sering dipilih adalah modal yang menekankan pada investasi-investasi yang luar biasa tetapi tidak menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dicapai dengan cara memperbaiki faktor manusia atau peningkatan suatu organisasi teknik. Ini berarti meningkatkan suatu sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan social; dan investasi bukan saja diarahkan untuk peningkatan stok capital fisik tetapi stok capital manusiawi dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan

dan gizi pada gilirannya perbaikan suatu sumber daya manusia akan menumbuhkan inistatif dan sikap-sikap kewiraswasta sehinga lapangan kerja baru tumbuh dan produktifitas nasional meningkat(Bintoro Tjokroamidjojo/Mustopadidjaya, 1982:43-44). Inilah teori sumber daya manusia menurut hemat kami melandas pemberdayaan manusia, dan berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah diharapkan berperan dan mempengaruhi unsure-unsur pembangunan ini.

Selanjutnya, keterbelakangan yang menandai negara-negara yang sedang berkembang atau masyarakat clunia ketiga di bidang social, ilmu dan teknologi merupakan penghilang utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pemecahan dalam kesulitan-kesulitan ekonomi merupakan syarat atau modal dasar usah keras melawan keterbelakangan. Dalam usah ini diperlukan dengan keadilan. Usaha ini mencakup sebagaimana yang dikemukakan dalam teori “kecil itu indah” oleh Schumacher dan *Basic Needs*, mulai dari yang paling butuh tanpa menghentikan sector modal yang konstruktif. Lalu paradigma ketergantungan yang bersama-sama dengan teori sumber daya manusia dimasukan dalam kategori pendekatan *Fundamental Changes* yang mengarah dengan motif kuat kepada kesadaran dan kemauan untuk berdiri atau mandiri (Tjokroamidjojo/Mustopadidjaya 1982:54). Melepaskan diri dari ketergantungan merupakan suatu strategi pembagunan yang lebih berorientasi kedalam. Dengan cara mengganti kebijaksanaan subtitusi import dengan pembahasan.

Dari segala macam keterbelakangan yang disebabkan oleh kondisi ketergantungan. Dan karena itu diperlukan peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, gizi serta

organisasi dan disiplin yang tangguh untuk membuat masyarakat kecil, atau masyarakat lebih berdaya, itulah pemberdayaan suatu konsep dan, teori yang ingin menyodorkan pendekatan untuk mencukupi kebutuhan dasar, meningkatkan suatu kemausiaan dan melepaskan diri dari ketergantungan serta mengembangkan diri, mengajukan ide-ide serta mampu mengambil keputusan bagi masa depan mereka sendiri. (John Kompton 1995-210-2)

Metode Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penilitian ini adalah: Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera utarah (HALUT). Fokus penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peran kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mamuya kecamatan galela kabupaten Halmahera utarah dapat dioperasionalkan dengan sebagai berikut :

- a. membina kehidupan masyarakat desa
- b. membina perekonomian desa
- c. mengordinasikan pembagunan desa secara partisipatif

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati dilakukan pemilihan kepada masyarakat di desa sebagai informan ini pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap penelitian.

Hasil Penelitian

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa.Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab atas roda pemerintah yang ada di desa.

Selain pemimpin dalam roda pemerintah, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di desa sebagaimana di atur dalam peraturan UU No 6 Tahun 2014 sebagai pembangun menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut.

Salah satu konsep pembangunan ekonomi yang merangkap nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat menampilkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di desa terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini sebagian besar berasal dari PNPM. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini mencapai pembangunan desa tersebut. Keteladanan merupakan unsure yang memegang peran penting dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa lihat dari cara pembinaan yang dilakukan seorang kepala desa.

Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang

harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk di bankitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dalam hubungannya dengan pembinaan, tata mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melencang atau menyalahi aturan harus diterbitkan dan yang masih kosong harus diisi. Sebagai pemimpin di desa mamuya, kepala desa membina kehidupan masyarakat dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong di antara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. sebagai desa swadaya yang penduduknya sebagian

besar adalah berprofesi sebagai seorang petani dan petambang pasir dan batu, kegiatan-kegiatan dalam petani dan petambang pasir dan batu pun dilakukan secara bergotong royong. Misalnya dalam membangun seluruh irigasi tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-sama.

Salah satu kebiasaan yang ada di desa ini yaitu sebelum melakukan tanam pohon kelapa dan pohon pala, para warga selalu bergotong royong. Bahkan kepala desa turun langsung dengan warganya turun ke perkebunan warga untuk menanam pohon kelapa dan pohon pala bersamanya.

Hal ini senada diungkapkan oleh Bpk Y.P salah seorang tokoh masyarakat yang ada di desa mamuya : *Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu bergotong royong. Salah satu contohnya saat membangun pagar beton, para warga saling bergotong royong karena warga di sini juga kebanyakan adalah buruh bangunan, sehingga tidak perlu lagi membayar buruh untuk mengerjakan pembangunan di desa ini, kebanyakan pembangunan di desa ini semuanya dilakukan dengan gotong royong sehingga menghemat pengeluaran*".

Begitu pula diungkapkan oleh R.T salah seorang petani muda mengungkapkan bahwa : *kepala desa selalu mengajak warganya untuk bergotong royong, baik itu membersihkan desa, saat membangun desa, bahkan dalam bertani pun kepala desa beserta warga desa di sini selalu bergotong royong. Salah satu kegiatan gotong royong yang di lakukan secara bersama-sama. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh warga desa.*

Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada warganya, kepala desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat

melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa terhindar dari perbuatan asusila seperti minuman tuak, berjudi, merampok dan perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan, selain itu juga dengan melakukan pengajian rutin tiap bulanya. Pembinaan dengan keagamaan dilakukan sejak melalui TK/TPA di masjid maupun di gereja tiap dusun.

Selain itu kepala desa juga membina kehidupan warganya tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-kegiatan non formal. Kepala desa senantiasa mengajak warganya berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, saling berbincang-bincang dan mengajak warganya untuk berbincang-bincang secara terbuka.

Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta manfaat pemberdayaan masyarakat. sebab bagaimana pembanguana akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarakan dengan warga desa umumnya dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya. Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan sekat-sekat antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Perekonomian desa sangatlah penting untuk dikelola di bina. Efektivitas pengelolaan keuangan desa merupakan tujuan dari kepala desa mamuya . pemasukan anggaran yang tidak stabil dan belum tergalinya

sumber APBD masyarakat desa mamuya serta belum adanya badan usaha milik desa merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

APBD merupakan anggaran pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk angka, pada hakikatnya APBD adalah program tahunan. Anggaran desa yang tertuang dalam desa merupakan satu kesatuan yang terdiri anggaran rutin anggaran pembaguna ditetapkan dengan keputusan desa untuk setiap tahun.

Senada dengan hal di atas, ketua BPD desa mamuya Bpk B. K mengatakan bahwa : *selaku pengawas dan penampung aspirasi warga desa dalam pengelolaan perekonomian desa. Penyusunan APBD didasarkan pada partisipasi masyarakat. penggunaan ADD juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana, 30% dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga menjalankan fungsinya di dalam mengawasi pengelolaan ADD, dimana kepala desa selalu melaporkan kondisi keunagan desa setiap 3 bulan*”.

Disamping kemampuan aparat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecil partisipasi masyarakat merupakan factor penting dalam proses pembagunan, karena pada kenyataan pembagunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. keikutseraan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembagunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparat pemerintah desa tidak negative dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan penilaian terhadap asyarakat dan pelaksanaan

pembagunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarkat desa.

Prosudur yang di persulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pembagunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarkat dalam merencanakan pembagunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musawara. Hampit setiap kegiatan pembagunan yang di lakukan di desa mamuya dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala desa selalu melakukan kordinasi dengan perangkat desanya, kepala desa juga selalu mengordinasikan dengan atasnya seperti camat dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tertarik adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, Dari segi Pembagunan fisik desa yakni pembagunan dalam prasarana produksi yaitu pembagunan pagar beton yang dananya berasal dari alokasi dana desa.
2. Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kreatif lokal dan modal social yang suda dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbukan kembali semangat gotong royong, sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa dan melakukan

pembangunan desa dan pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat pada pengelolah keuangan desa dengan sefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dengan mengelolah potensi yang di miliki oleh desa mamuya selain mengembankan potensi tambag pasir, tambag batu dan pertanian, dalam mengembankan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.

Saran

1. Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayan masyarakat yang ada di desa semakain berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tantangan social, politik, dan ekonomi.
2. Menikatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meninkatkan (SDM) dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhamad. 1986. Kamus Bahasa Indonesia, Angkasa Bandung.
- Hadari Nawawi. 1995. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aperatur Pemerintah, Erlanga, Jakarta.
- Miftah Thoha, 1983. Pengawasan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Gunung Agung, Jakarta.

Ndraha Talizuduhu, 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintah Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta.

Poerwadarmint. W.J.S. 1985. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Prasadja Budi. 1983. Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan. Liberti, Yogyakarta.

Siagian, S.P. 2003. Teori Praktek Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Sugiono, 2002, Statika Penelitian, Alfa Beta, Bandung.

Siagian, Sondang, 1997. Administrasi Bandung Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung.

Talisuduhu Ndraha, 1986. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Yayasan Karya Drama. Jakarta.

Rineka Cipta. Awang, San Afri, 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan. Jakarta.